

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu upaya konkret dalam mengurangi dampak negatif dan menambahkan dampak positif terhadap para pemangku kepentingan pada ranah ekonomi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan 3 P (*People, Planet dan Profit*), prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia ada yang bersifat sukarela dan ada yang karena sudah diwajibkan oleh Undang-Undang dalam bentuk sanksi administratif. Hal ini menimbulkan *gap* diantara peraturan yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu penerapan sanksi administratif bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan CSR dan dampak penerapan sanksi administratif bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan CSR.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode normatif yaitu suatu metode yang menggunakan kesesuaian teori berupa hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku, literatur, karya ilmiah, jurnal. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi administratif terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak berjalan seperti apa yang sebenarnya diharapkan, karena belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dampak penerapan sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan CSR terdapat dua persepsi yaitu wajib dan sukarela.

Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dianggap multitafsir dan inkonsistensi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan CSR berdampak pada lesunya iklim investasi karena, terjadi tumpang tindih baik dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang merepotkan pihak investor. Kedepannya diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga CSR menjadi sebuah kewajiban Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : sanksi administratif, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concrete effort to reduce negative impacts and increase the positive impacts for stakeholders in the economic sphere in achieving sustainable development, this is related to the priority sustainable development for 3 P (People, Planet dan Profit), the principles of implementing CSR in Indonesia are voluntary and some are because they are required by law in the administrative sanctions. This creates a gap between the applicable regulations in the society. There are two main problems on this thesis, which are the application of administrative sanctions for companies, that is not implement CSR and the impact of applying administrative sanctions for companies that not implement CSR.

The method used in writing this thesis is normative juridical method, which is a method that uses the suitability of the theory in the form of positive law, law principles, and also law doctrines. The research specification is descriptive analytical. The data form are primary which is consisting of interviews, the secondary data are consisting of library materials such as books, literature, scientific papers, journals. The results of research showed that the application of administrative sanctions on Companies that did not carry out CSR did not run as expected, because it had not been specifically regulated in the legislation. The impact of applying sanctions for limited companies that do not implement CSR are two perceptions, namely mandatory and voluntary.

The conclusion of this thesis is that corporate social responsibility carried out by the companies are considered to be multiple interpretations and inconsistencies with statutory regulations and the application of CSR has an impact on the sluggish investment, because there is an overlap in both the law and regional regulations that are complicated for investors. In the future, harmonization of legislation regulations is needed, so that CSR becomes a limited liability for companies.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Administrative sanctions.